

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan wujud upaya pemerintah dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan serta tata kelola pemerintahan yang baik (Herdiana, 2022). Pembangunan di Indonesia secara empiris belum mampu terealisasi secara masif di berbagai wilayah, bahkan dibandingkan dengan beberapa negara maju maupun berkembang masih menempati posisi yang terburuk (Firdaus, 2013; Herdiana, 2022). Pemerintah melalui kebijakannya memfokuskan pembangunan di wilayah tertentu, yaitu pulau Jawa. Pembangunan yang pesat di pulau Jawa membuat pembangunan di luar pulau Jawa dirasakan lambat. Hal tersebut menimbulkan pemahaman akan konsep pembangunan "Jawanisasi" yang mana pulau Jawa sebagai sentral dari pembangunan Nasional. Padahal, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan harus dilakukan di seluruh wilayah Indonesia sehingga menciptakan keberimbangan dan keadilan pembangunan yang pada akhirnya dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat (Herdiana, 2022).

Pesatnya Pembangunan di pulau Jawa mendorong tingginya urbanisasi penduduk yang mendiami pulau Jawa. Data penduduk yang Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai sinkronisasi dari Sensus Penduduk 2020 dengan data administrasi kependudukan



menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 271,35 juta jiwa hingga Desember 2020. Sebanyak 131,79 juta jiwa atau 55,94% penduduk Indonesia berada di Jawa. Proporsi penduduk Indonesia yang berada di Sumatera mencapai 21,73%, Sulawesi sebanyak 7,43% dan Kalimantan sebanyak 6,13% (Annur, 2021). Tingginya proporsi penduduk yang mendiami Pulau Jawa mengakibatkan beban Pulau Jawa, khususnya Jakarta sudah semakin berat. Analisis mengenai beban kependudukan Indonesia selama ini terkonsentrasi di Pulau Jawa merupakan salah satu alasan yang dilakukan pemerintah melalui koordinasi Kementerian PPN/BAPPENAS mengenai pemindahan ibu kota baru di Kawasan luar pulau Jawa (Purnama & Chotib, 2022).

Implikasi daripada tingginya proporsi penduduk yang mendiami pulau Jawa menimbulkan permasalahan turunan di Indonesia, yaitu kemacetan lalu lintas yang secara inheren berdampak pada kerugian ekonomi (Sugiarto, 2022). Hasil riset bank dunia melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian ekonomi mencapai Rp 65 triliun per tahun dengan tingkat kemacetan di Jakarta yang mencapai 53% (World Bank, 2019). Jakarta merupakan kota dengan tingkat kemacetan tertinggi ke 10 di Asia. Akibat yang ditimbulkan dari kemacetan tersebut membuat peningkatan 1% urbanisasi di Indonesia hanya bisa meningkatkan 1,4% Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita (Sugiarto, 2022). Kontribusi



Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia atas PDB sangat signifikan atau “Jawasentris” juga menjadi alasan pemerintah

melakukan pemindahan Ibu Kota baru di Kawasan luar pulau Jawa. Karena, pulau Jawa memberikan kontribusi PDB sebesar 57,89 persen dari PDB Nasional pada tahun 2021 yang mencapai Rp16.970,8 triliun dengan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau USD4.349,5. Mayoritas kontribusi PDB Pulau Jawa berasal dari DKI Jakarta dengan PDB per kapita mencapai Rp274,7 juta, sementara rata-rata Nasional hanya mencapai Rp62,2 juta. Artinya PDB per kapita DKI Jakarta lebih dari empat kalinya PDB rata-rata Nasional (Purnama & Chotib, 2022).

Selain PDB, pemerintah menganggap ketersediaan air bersih di Jawa yang tengah menghadapi krisis air juga menjadi perhatian bagi pemerintah dalam melakukan pemindahan Ibu Kota baru (Purnama & Chotib, 2022). Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jawa khususnya Jakarta mengalami krisis air yang cukup parah bahkan isu mengenai tenggelamnya Jakarta telah lama dibahas (Sugiarto, 2022). Sejumlah kajian pun menyebutkan bahwa Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah mencapai 35-50 cm selama kurun waktu tahun 2007-2017 serta sekitar 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir di bawah 10 tahunan yang dimana ideal kota besar minimum 50 tahunan (Kementrian PPN/Bappenas, 2021).

Pemindahan Ibu Kota tidak hanya berdasarkan hasil internalisasi kondisi di Indonesia, melainkan juga bercermin pada keberhasilan Negara-

ain dalam memindahkan ibukotanya, seperti Amerika Serikat yang

ahkan ibu kotanya dari New York ke Washington DC dengan alasan



untuk memisahkan pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis. Brazil memindahkan ibu kota dari Salvador ke Rio de Janeiro dengan alasan kepadatan penduduk dan kemacetan tinggi. India yang memindahkan ibu kota dari Calcutta ke New Delhi dengan alasan faktor politik dan ekonomi. Bahkan negara dalam Kawasan ASEAN seperti, Australia yang memindahkan ibu kotanya dari Melbourne ke Canberra dengan alasan kepadatan penduduk dan Malaysia yang memindahkan ibu kota negara dari Kuala Lumpur ke Putrajaya dengan alasan kemacetan dan kepadatan penduduk. Keberhasilan pemindahan ibu kota negara-negara diatas diharapkan dapat terwujud di Indonesia dan menoreh beragam dampak positif (Aziz, 2019).

Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur yang dianggap sebagai posisi paling strategis, dipertimbangkan akan memberikan dampak positif seperti, pemerataan pembangunan yang mengubah *mindset* pembangunan yang semula Jawasentris menjadi Indonesiasentris, peningkatan iklim investasi, lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan nasional (Aziz, 2019). Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan ekonomi di Indonesia menemukan bahwa struktur perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,17% pada triwulan II tahun 2023 dan secara spasial didominasi oleh wilayah Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 57,27%. Adapun wilayah lainnya yang berhasil tumbuh di atas

lahan ekonomi nasional adalah Pulau Kalimantan, Sulawesi, serta

dan Papua (Badan Pusat Statistik, 2023).



Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di pulau Kalimantan mencapai 5,56% (Badan Pusat Statistik, 2023), yang dimana pertumbuhan ekonomi tersebut meningkat dibandingkan pada triwulan II tahun 2022 yang mencapai 4,54% (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada triwulan II tahun 2023 Pulau Kalimantan berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia sebesar 8,32%. Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontributor tertinggi untuk perekonomian di Pulau Kalimantan yang mencapai 3,55% (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Bank Indonesia melalui hasil asesmen rutin yang dilakukan setiap triwulan mengenai pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur yang menemukan bahwa perekonomian Kaltim tahun 2023 diperkirakan tumbuh pada rentang 4,30% s.d 5,10% year on year (yoy). Kinerja ekonomi Kaltim pada tahun 2023 ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan, pertanian dan perdagangan seiring kenaikan permintaan konsumsi baik domestik maupun global. Sementara itu, sektor lapangan usaha pertambangan dan konstruksi juga diperkirakan masih tumbuh positif, ditopang oleh permintaan ekspor batu bara dan migas yang masih kuat terutama dari negara mitra strategis Kaltim yaitu Tiongkok dan India, serta akselerasi pembangunan proyek strategis pemerintah khususnya IKN dan proyek korporasi (Bank Indonesia, 2023).

Wilayah yang juga berhasil tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi adalah Pulau Sulawesi. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sulawesi mencapai 6,64% (Badan Pusat Statistik, 2023), bahkan



pada triwulan II tahun 2022 Pulau Sulawesi konsisten mengalami pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 6,48% (Badan Pusat Statistik, 2022). Tidak hanya itu, pada triwulan I tahun 2023 Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dan tertinggi dibandingkan pulau lainnya di Indonesia yang mencapai 7,00%. Pada triwulan II tahun 2023 Pulau Sulawesi berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia sebesar 7,13%. Sulawesi Tengah merupakan kontributor tertinggi untuk perekonomian di Pulau Sulawesi yang mencapai 2,54% (Badan Pusat Statistik, 2023). Perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 diperkirakan tetap tumbuh tinggi pada kisaran 10,87% - 12,87% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah diperkirakan masih tetap berasal dari kontribusi lima lapangan usaha yaitu industri pengolahan, pertambangan, pertanian, konstruksi, dan perdagangan (Bank Indonesia, 2023).

Wilayah terakhir yang berhasil tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional adalah Pulau Maluku dan Papua. Pulau Maluku dan Papua mengalami pertumbuhan ekonomi mencapai 6,35% (Badan Pusat Statistik, 2023). Namun, dibandingkan pada triwulan II tahun 2022, Pulau Maluku dan Papua berhasil mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi mencapai 13,07% (Badan Pusat Statistik, 2022). Pada triwulan II tahun 2023 Pulau Maluku dan Papua berkontribusi terhadap perekonomian



Asia sebesar 2,57%. Maluku Utara merupakan kontributor tertinggi perekonomian di Pulau Maluku dan Papua yang mencapai 3,06%

(Badan Pusat Statistik, 2023). Perekonomian Provinsi Maluku Utara pada Triwulan II 2023 tumbuh sebesar 23,89% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 16,49% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara diperkirakan masih tetap berasal dari kontribusi lima lapangan usaha yaitu Industri pengolahan, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan perikanan (Bank Indonesia, 2023).

Hasil pemaparan di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi kelompok provinsi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi ditopang oleh lapangan usaha Industri pengolahan dan pertambangan & penggalan (Badan Pusat Statistik, 2023). Pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi mengalami pertumbuhan ekonomi yang senantiasa meningkat dan diharapkan mampu menjadi penopang IKN yang akan berdampak besar terhadap perkembangan Ibu kota Negara baru dalam menciptakan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia agar dapat dirasakan oleh semua elemen masyarakat.

Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang dimana disetiap periode masyarakat suatu negara akan berusaha menambah kemampuannya untuk memproduksi barang dan jasa (Taufik & Fitriadi, 2014; Winanto, 2019).



umbuhan ekonomi di indonesia hingga tahun 2023 mengalami pemerataan di setiap wilayahnya. Pertumbuhan ekonomi memiliki

hubungan erat dengan pembangunan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengetahui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier (Wiagustini et al., 2017). Namun, apabila pertumbuhan ekonomi menurun, maka berdampak pada menurunnya pendapatan daerah, meningkatnya pengangguran, dan daya beli masyarakat menurun (R. Wahyuningsih, 2022). Pemerintah dalam hal ini diharapkan mampu menganalisa dengan cermat mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu (Mulyaputri & Kartika, 2020). Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses berkembangnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat dan kesejahteraan masyarakat meningkat (Prabowo, 2018; Winanto, 2019). Pertumbuhan ekonomi secara umum didefinisikan sebagai peningkatan PDB riil per



Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai pasar dari total *output* negara, yaitu nilai pasar seluruh barang jadi dan jasa akhir yang

diproduksi selama jangka waktu tertentu oleh faktor-faktor produksi yang berada di suatu negara (Winanto, 2019).

Harrod-Domar memperkenalkan teori pertumbuhan ekonomi, setiap perekonomian pada dasarnya harus mencadangkan atau menabung sebagian dari pendapatan nasionalnya untuk menambah atau menggantikan barang-barang modal. Pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan melalui investasi baru yang bertujuan untuk memberikan tambahan netto terhadap cadangan atau stok modal (Syahputra, 2017). Investasi menjadi salah satu kata kunci dalam setiap upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Investasi juga merupakan salah satu faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor perdagangan, ekspor-impor, perbankan, transportasi dan asuransi (Wiagustini et al., 2017).

Investasi memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi, karena setiap tambahan investasi akan menyebabkan kenaikan pada jumlah *output* yang diproduksi. Kapasitas produksi yang meningkat berdampak pada dibutuhkannya jumlah tenaga kerja yang sesuai demi meningkatkan jumlah *output* yang mampu diproduksi. Sehingga permintaan akan tenaga kerja dari produsen atau perusahaan akan semakin besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investasi mampu membuat banyak lowongan pekerjaan yang tersedia. Banyaknya lowongan pekerjaan

menunjukkan tingginya penyerapan tenaga kerja (Indraswanti,



Menciptakan lapangan pekerjaan atau meningkatkan penyerapan tenaga kerja merupakan salah satu tujuan awal dari penyelenggaraan penanaman modal menurut UU RI Nomor 25 Tahun 2007. Investasi merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Perluasan investasi-investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja (Mulyaputri & Kartika, 2020). Investasi yang memiliki pengaruh besar merupakan investasi swasta karena investasi yang memiliki dampak secara langsung pada peningkatan produktivitas perusahaan, seperti pembelian mesin-mesin produksi baru, perluasan area produksi, serta pembukaan industri-industri baru serta perluasan atau menambah gudang-gudang penyimpanan produksi. Dampak yang diberikan dari investasi swasta ialah peningkatan kapasitas produksi serta kapasitas *output* sehingga dapat membuat tingginya kebutuhan akan penyerapan terhadap tenaga kerja (Suharto & Dharmala, 2016).

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu unit usaha. Penyerapan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud, salah satunya adalah tingkat upah. Sedangkan faktor eksternal adalah inflasi. Selama ini masalah upah sering timbul karena adanya

an pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha
erja (Prabowo, 2018). Upah merupakan suatu penerimaan sebagai



imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun keluarganya (Prabowo, 2018).

Aktivitas perekonomian yang diakibatkan oleh masalah tingkat upah dapat menyebabkan kejadian demi kejadian yang merugikan perusahaan dan masyarakat, seperti mogok kerja dan melakukan demonstrasi yang berlarut-larut sehingga menjadi pemicu penurunan produktivitas dan mengganggu aktivitas perekonomian secara luas. Dampak lainnya juga dapat mengganggu jalannya investasi dari pihak luar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh PDRB menjadikan pihak investor kurang percaya akibat ketidakstabilan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak pemerintah (Alexander et al., 2017).

Pemerintah melalui kebijakannya diharapkan mampu mengatasi perbedaan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Karena, upah memiliki dua sisi yang penting bagi pekerja dan perusahaan. Pekerja menganggap upah merupakan sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya yang berdampak pada adanya upaya dari pekerja meningkatkan pendapatannya, sedangkan perusahaan menganggap upah

biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan produksi, sehingga



dalam menjalankan aktivitas produksi perlu melakukan efisiensi dengan cara mengurangi biaya tenaga kerja (Soekapdjo & Oktavia, 2021).

Besar atau kecilnya tingkat upah yang dibuat oleh pemerintah akan berpengaruh pada permintaan penggunaan tenaga kerja. Karena, ketika terjadi peningkatan upah maka akan meningkatkan daya beli sehingga mendorong kegairahan bekerja dan dapat meningkatkan produktivitas kerja. Daya beli masyarakat yang meningkat akan ikut menumbuhkan permintaan barang dari pengusaha sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja (Nofrita & Marwan, 2022). Hal tersebut sesuai dengan teori efficiency wage yang menyatakan bahwa upah yang tinggi membuat pekerja lebih produktif. Pengurangan upah akan menurunkan tagihan upah perusahaan, itu juga akan menurunkan produktivitas pekerja dan laba perusahaan. Begitupun sebaliknya.

Upah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi keputusan pelaku usaha atau produsen dalam meningkatkan produksinya. Penambahan atau peningkatan produksi sangat bergantung pada jumlah stok barang modal yang tersedia (capital stock). Untuk meningkatkan produksi, maka salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melakukan penambahan jumlah capital stock atau yang sering disebut investasi (Sirait, 2020). Investasi berpengaruh besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan. Besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya



an tenaga kerja, semakin besar investasi maka semakin besar pula
in penggunaan tenaga kerja. Permasalahan dalam pertumbuhan

ekonomi dan ketenagakerjaan yang selanjutnya adalah inflasi (Desideria et al., 2019).

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan ketidaklancaran distribusi (Karlina, 2017). Pihak yang paling memungkinkan dalam mengatasi inflasi ialah pemerintah (Suharto & Dharmala, 2016). Indonesia sebagai negara berkembang kerap kali mengalami permasalahan atas kenaikan harga barang (inflasi), pengeluaran atau belanja pemerintah yang kurang tepat sasaran bagi perkembangan ekonomi serta nilai ekspor yang kurang stabil akan menyebabkan perekonomian Indonesia rentan krisis. Tingginya inflasi yang terjadi akan menghambat dalam pembangunan ekonomi dan aktifitas perekonomian pada masyarakat sehingga memperlambat kegiatan perekonomian dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi (Mahzalena & Juliansyah, 2019).

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sangat bergantung pada peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiaya kegiatan pembangunan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi, yang sering disebut sebagai pengeluaran pemerintah (Zahari, 2017). Pandangan untuk



kaitan antara pengeluaran pemerintah dengan perkembangan
 omian dapat dianalisa melalui hukum Wagner (Wagner Law), yang

mengatakan bahwa setiap pertambahan pendapatan perkapita maka selaras dengan pengeluaran pemerintah yang juga meningkat (Solikin, 2018; Erdkhadifa, 2022). Pengeluaran pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal yang perlu dilaksanakan dan dikerjakan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan (revenue) dan pengeluaran (expenditure) pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2016; Zahari, 2017; Amelia & Ekobelawati, 2018).

Pemerintah daerah memperoleh bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan, selain dari sumber utama berupa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Hasan, 2015; Amelia & Ekobelawati, 2018). Berdalih pada teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan menjadi stimulus



omian. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong i, dengan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan

menciptakan lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan (Hasan, 2015; Amelia & Ekobelawati, 2018).

Kebijakan pemerintah dalam merelokasi ibu kota negara ke Kalimantan Timur merupakan strategi pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan yang semula Jawasentris menjadi Indonesiasentris. Pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dapat memberikan dampak positif dan juga negatif terhadap negara maupun daerah yang akan menjadi ibu kota. Beberapa dampak positif dari pemindahan ibu kota negara, seperti pemerataan pembangunan nasional, peningkatan iklim investasi, pengembangan dunia usaha atau sumber ekonomi baru, peningkatan pendapatan daerah maupun nasional, dan peningkatan lapangan pekerjaan. Sedangkan dampak negatif dari pemindahan ibu kota negara, seperti tingginya biaya relokasi IKN, resiko penambahan beban utang, berpotensi mengalami inflasi jika pembangunan mangkrak, perubahan grand desain penataan daerah dan sebagainya (Aziz, 2019).

Persiapan yang terukur dan terencana merupakan langkah yang harus ditempuh oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan relokasi ibu kota negara. Pemerintah diharapkan dapat bijaksana dalam mengambil setiap keputusan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena pemindahan ibu kota negara yang memerlukan dana besar harus linier

peningkatan ekosistem ekonomi baru dalam meningkatkan uhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata di Indonesia. Jakarta



sebagai ibukota negara Indonesia, membutuhkan daerah penyangga (hinterland) untuk mengatasi keterbatasan Jakarta dalam mengakomodasi pengembangan pusat pemerintahan dan ekonomi. Daerah penyangga yang kemudian menjadi konsep kota megapolitan yaitu Jabodetabek atau gabungan dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendukung Jakarta sebagai kota inti dari pusat pemerintahan dan pusat perekonomian (Herdiana, 2022).

Bercermin pada konseptualisasi tersebut, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memerlukan wilayah yang dapat menjadi penyangga dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. Wilayah yang dinilai mampu dalam menopang keberadaan IKN adalah Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesi yang terletak di sebelah Pulau Kalimantan merupakan pulau yang terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai sektor ekonomi seperti industri, pertanian, dan energi untuk IKN. Pulau Sulawesi terletak di tengah Indonesia, menjadikannya sebagai pusat yang strategis untuk perdagangan dan transportasi. Hal ini membuat Sulawesi menjadi lokasi yang potensial untuk pusat distribusi dan investasi. Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan infrastruktur yang berkembang di Pulau Sulawesi juga menjadi indikator penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan IKN.



Berdasarkan hasil analisis pertumbuhan ekonomi di Indonesia
 ikan bahwa wilayah yang berhasil tumbuh di atas pertumbuhan

ekonomi nasional selain Pulau Sulawesi adalah Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan berkontribusi terhadap perekonomian di Indonesia sebesar 8,32 persen yang mana Provinsi Kalimantan Timur merupakan kontributor tertinggi untuk perekonomian di Pulau Kalimantan yang mencapai 3,55 persen (Badan Pusat Statistik, 2023). Hasil analisis Bank Indonesia, kinerja ekonomi Pulau Kalimantan diperkirakan akan terus tumbuh positif akibat permintaan ekspor batu bara dan migas yang masih kuat terutama dari negara mitra strategis Kaltim yaitu Tiongkok dan India (Bank Indonesia, 2023).

Hasil pemaparan di atas memberikan pemahaman bahwa pertumbuhan ekonomi di IKN sangat bergantung pada aktivitas perekonomian yang terjadi di wilayah sekitarnya, terkhusus wilayah yang menjadi penopang IKN seperti Sulawesi dan Kalimantan. Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi dan faktor fundamental yang menentukan pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu diteliti, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pencapaian kinerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, dimana negara berkembang seperti Indonesia sering mengalami permasalahan atas kenaikan harga barang (inflasi), pengeluaran atau belanja pemerintah yang kurang tepat sasaran bagi perkembangan ekonomi serta nilai ekspor yang kurang stabil akan menyebabkan perekonomian Indonesia rentan krisis (Mahzalena &

ah, 2019). Hasil pertimbangan empiris tersebut mendorong peneliti mengkaji bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional, Dana



Transfer pusat dan Inflasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui Investasi Swasta dan Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan masalah Apakah Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Penyangga Ibu Kota Nusantara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Investasi di Daerah Penyangga IKN
2. Dana Transfer Pusat berpengaruh terhadap Investasi di Daerah Penyangga IKN
3. Inflasi berpengaruh terhadap Investasi di Wilayah Penyangga IKN
4. Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Penyangga IKN
5. Dana Transfer Pusat berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Penyangga IKN
6. Inflasi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah



yang IKN

7. Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga IKN
8. Dana Transfer Pusat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga IKN
9. Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga IKN
10. Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga IKN
11. Penyerapan Tenaga Kerja berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Penyangga IKN
12. Inflasi berpengaruh terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Penyangga IKN
13. Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi di Wilayah Penyangga IKN
14. Dana Transfer Pusat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi di Wilayah Penyangga IKN
15. Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Investasi di Wilayah Penyangga IKN
16. Upah Minimum Provinsi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Penyangga IKN
17. Dana Transfer Pusat berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Penyangga IKN



18. Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Penyerapan Tenaga Kerja di Wilayah Penyangga IKN

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pemikiran yang akan memberi manfaat yang terkait secara langsung dengan penelitian yang relevan dengan penelitian yaitu :

1. Kegunaan Teotiris

Memberikan manfaat dan implikasi baik secara teoritis keilmuan dan bidang ilmu yakni pemahaman secara makro dan mikro keterkaitan antara UMR, Dana Transfer Pusat, Inflasi, Investasi Swasta, Penyerapan Tenaga Kerja Sama Pertumbuhan Ekonomi di wilayah penyangga Ibukota Negara.

2. Kegunan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Pusat membantu dalam mengambil kebijakan dalam membantu memajukan pembangunan ekonomi melalui peningkatan pertumbuhan sebagai realisasi peningkatan ekonomi daerah.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi ataupun menjadi gap penelitian bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang memiliki permasalahan penelitian yang relevan terkhusus penelitian Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Upah Minimum Provinsi

Upah merupakan salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan produsen sebagai balas jasa atas kegiatan produksi yang dilakukan tenaga kerja (Tjandraningsih, 2009). Upah adalah balas jasa yang diberikan Perusahaan/organisasi kepada para pekerja yang besarnya telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak (Kadarisman, 2016).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan (PP 36/2021) pasal 1 ayat 1, Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan, dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan (Republik Indonesia, 2021).

2.1.1 Teori Dana Upah oleh Jhon Stuart Mill.

Menurut teori ini, tinggi upah tergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong



tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja. Keadaan terbalik apabila penawaran tenaga kerja lebih tinggi dibandingkan permintaannya maka upah cenderung naik (Jhingan, 2016).

2.1.2 Teori Upah Wajar oleh David Rocardo

Teori ini menerangkan bahwa upah ditetapkan dengan berpedoman kepada biaya-biaya yang diperlukan untuk membiayai segala keperluan hidup buruh atau tenaga kerja. Teori ini menegaskan kepada buruh, bahwa sejumlah uang yang diterimanya sebagai upah itu adalah sudah sewajarnya, karena memang hanya itu kemampuan produsen (Asikin et al., 2016).

2.1.3 Teori Upah Besi oleh Ferdinand Lassalle

Penerapan sistem upah wajar menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, sebab kalau teori itu yang dianut mudah saja produsen mengatakan cuma itu kemampuannya tanpa berfikir bagaimana susahnyanya buruh. Menurut teori ini, buruh harus berusaha menentangnya. Karenanya Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan para produsen terhadap upah pekerja dengan dibentuk serikat pekerja (Asikin et al., 2016).

2.1.4 Upah Minimum Provinsi

Upah minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (Rosandi et al., 2017). Upah minimum adalah tingkat upah paling rendah yang masih boleh dibayarkan perusahaan kepada para



nya, upah yang dibayarkan kepada pekerja tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang sudah ditetapkan (Tjandraningsih, 2009). Upah

adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau

pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha (Susanti 2022).

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur dengan tegas dan jelas mengenai pengupahan.

Pasal 88 ayat (1): “Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. (2). “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Upah minimum biasanya ditentukan oleh pemerintah, dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu, yaitu:

- a. Untuk menonjolkan arti dan peranan tenaga kerja (buruh) sebagai sub sistem dalam suatu hubungan kerja.
- b. Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan secara materiil kurang memuaskan.
- c. Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan.
- d. Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan.
- e. Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara formal

(Rosandi et al., 2017).



nsfer Pusat

Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi berupa dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewahan DIY, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Sebagai instrument desentralisasi fiskal dana transfer ke daerah diarahkan untuk memperkuat pendanaan Pembangunan daerah dalam mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat (Republik Indonesia, 2022).

2.2.1 Dana Perimbangan

Pemerintah Pusat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengalokasikan sejumlah dana dari anggaran pendapatan belanja negara APBN sebagai dana perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Republik Indonesia, 2022).

2.2.2 Dana Otonomi Khusus

UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi kedua atas UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di Provinsi Papua. Selain itu, juga telah ditetapkan peraturan pelaksanaan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 melalui PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta PP Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. dan Provinsi Papua Barat diberikan dana otonomi khusus yang



besarnya ditetapkan setara dengan dua persen dari pagu DAU nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan (Kemenkeu RI, 2023).

2.2.3 Dana Keistimewaan DIY

Pemerintah mengalokasikan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka penyelenggaraan kewenangan keistimewaan yang meliputi lima urusan kewenangan, yaitu (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur; (2) kelembagaan; (3) kebudayaan; (4) pertanahan; dan (5) tata ruang (Kementerian Keuangan RI, 2016).

2.2.4 Dana Insentif Daerah (Insentif Fiskal)

Dana Insentif Daerah (DID) yang merupakan bagian dari TKD berubah nomenklatur menjadi Insentif Fiskal mulai tahun anggaran 2023. Pemerintah pusat mengalokasikan DID untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang mempunyai kinerja baik dalam bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah agar meningkatkan: (1) kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah, (2) kualitas pelayanan pemerintahan umum, (3) kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) upaya pengentasan kemiskinan (Kemenkeu, 2022).

2.2.5 Dana Desa

Dana Desa merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan (Republik Indonesia). Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan



angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Selanjutnya, desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN (Kemenkeu, 2022).

2.3 Inflasi

Inflasi merupakan kecenderungan dari harga-harga yang secara umum naik dan berlangsung terus menerus. Kenaikan yang dimaksudkan merupakan kenaikan secara meluas. Inflasi juga merupakan suatu keadaan yang timbul karena tidak adanya keseimbangan antara permintaan akan barang-barang dengan persediaannya (Mankiw, 2018). Inflasi adalah tingkat kenaikan harga barang-barang secara umum dan sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (*overheated*), yaitu suatu kondisi dimana permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksinya, sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan harga. Setiap negara akan berupaya untuk meningkatkan perekonomian dengan tingkat pertumbuhan yang baik untuk mendekati tingkat kapasitas penuh, tetapi tidak berkeinginan menciptakan tekanan inflasioner (Ekananda, 2019).

Naik turunnya inflasi di suatu negara merupakan sebuah fenomena moneter yang dilihat sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perekonomian sesuai dengan Teori inflasi Keynes yang menyatakan bahwa inflasi memiliki hubungan dengan arus barang atau jasa serta arus uang yang akan menimbulkan deflasi



terhadap perekonomian, sehingga dapat memelihara dan menjaga i yang merupakan tujuan utama dari kebijakan moneter dimana laju

upayakan agar tetap stabil sehingga tidak akan menimbulkan masalah

pada makroekonomi, oleh karenanya kebijakan moneter yang sering diterapkan oleh pemerintah digunakan dan dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi diantaranya dengan cara menekan kestabilan harga dan memperkuat daya beli Masyarakat (Simanungkalit, 2020).

Pengendalian inflasi secara umum oleh pemerintah terbagi melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter (Nopirin, 2010):

1. Kebijakan moneter

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan melakukan pengaturan pada jumlah uang yang beredar ataupun melakukan kebijakan *Inflation Targeting Framework* (ITF) yang mulai diberlakukan pada tahun 2005.

2. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dan mengatur perpajakan untuk mengatasi inflasi pemerintah mengambil langkah, Menekan pengeluaran pemerintah, Menaikkan pajak dan Mengadakan pinjaman pemerintah.

3. Kebijakan non moneter

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi inflasi diluar kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan non-moneter yang dilakukan pemerintah antara lain mengendalikan harga, menaikkan hasil produksi dan kebijakan upah.

2.3.1 Teori Inflasi Kuantitas

Teori ini menyoroti Inflasi hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang beredar (menambahkan uang kartal atau giral) tanpa disertai perubahan yang jumlah produksi barang. Laju inflasi juga ditentukan oleh ekspektasi adap kenaikan harga-harga barang dimasa mendatang (Boediono,



2.3.2 Teori Inflasi Keynes

Konsep dasar teori Keynes dalam inflasi didasarkan pada teori makro-nya. Inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya (*disposable income*). Hal tersebut diterjemahkan dalam suatu kondisi dimana permintaan masyarakat akan barang melebihi jumlah barang yang tersedia, sehingga muncul *inflationary gap*. *Inflationary gap* ini muncul karena masyarakat berhasil menuangkan aspirasi mereka menjadi permintaan efektif akan barang-barang.

2.4 Investasi Swasta

Investasi adalah pengeluaran oleh sektor produsen (swasta) untuk pembelian barang atau jasa untuk penambahan stok yang digunakan atau untuk perluasan pabrik (Boediono, 2016). Investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor untuk membiayai kegiatan produksi agar mendapatkan profit dimasa yang akan datang. Investasi tercipta darii penanaman modal baik secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai pihak dengan tujuan memperbesar *output*.

Menurut Sukirno (2011) kegiatan investasi yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni (1) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan



kesempatan kerja; (2) pertambahan barang modal sebagai akibat menambah kapasitas produksi; (3) investasi selalu diikuti oleh teknologi (Sukirno, 2011).

2.4.1 Jenis Penanaman Modal

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) (Republik Indonesia, 2007).

1. Penanaman Modal Asing (PMA)

Pengertian penanaman modal asing menurut Hulman dan Anner (2008) adalah suatu kegiatan penanaman modal yang didalamnya terdapat unsur asing (*fireight element*) yang ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal, dan sebagainya. Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan modal milik asing maupun modal patungan antara modal milik asing dengan modal dalam negeri (Panjaitan & Sianipar, 2008).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Pasal 1 ayat (3) Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (Republik Indonesia, 2007).

Negara yang sedang berkembang pada umumnya berkeyakinan bahwa pembangunan ekonominya akan dapat dikembangkan lagi jika dapat memanfaatkan modal asing. Modal tersebut dimanfaatkan ke dalam sektor- sektor yang cukup produktif. Untuk aliran modal asing yang lebih besar lagi perlu diciptakan iklim yang baik sehingga modal asing tersebut dapat disertakan dalam

an ekonomi. Oleh karena itu, persyaratan-persyaratan mengenai modal asing perlu dipersiapkan sebaik- baiknya (Asiyan, 2013).



Peranan penanaman modal asing adalah bersifat komplementer yang diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan. Sebagaimana diketahui Pembangunan ekonomi berarti pengelolaan kekuatan ekonomi yang potensial menjadi kekuatan bagi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan kecakapan manajemen, teknik dan organisasi (Alice et al., 2021)

2. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri (Republik Indonesia, 2007). Upaya pengembangan penanaman modal dalam negeri telah dirintis oleh pemerintah, salah satunya dengan kebijakan kredit investasi. Pemberian kredit investasi memerlukan keahlian dalam prioritas pembangunan. Sebuah pengalaman menunjukkan bahwa penyaluran kredit investasi sering didasarkan pada perintah atau komando dari atasan. Hal demikian telah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dimana terjadi pemborosan keuangan negara dan pengaruhnya kepada laju inflasi yang terjadi (Asiyan, 2013).

2.4.2 Teori Investasi Neo Klasik

Klasik menekankan pentingnya tabungan sebagai sumber investasi. Investasi dipandang sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Makin cepat perkembangan investasi ketimbang laju pertumbuhan penduduk, makin cepat perkembangan volume stok kapital rata-rata per tenaga kerja.



io kapital per tenaga kerja cenderung makin tinggi kapasitas produksi

a. Tokoh Neo Klasisk, Sollow dan Swan memusatkan perhatiannya

pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi dan *output* saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 2010).

2.4.3 Teori Harrod-Domar

Harrod-Domar mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes yang menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan atau jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa yang lebih besar (Sukirno, 2011).

2.5 Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi, karena tenaga kerja mampu menggerakkan faktor-faktor produksi yang lain untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat 2, Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat (Republik Indonesia, 2003).

Tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur di dalam batas usia ri pemilihan batas umur tersebut agar definisi yang diberikan sedapat ambarkan kenyataan yang sebenarnya. Setiap negara memilih batas beda karena situasi tenaga kerja pada masing-masing negara juga



berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama. Batas umur minimal untuk tenaga kerja di Indonesia adalah berumur 15 tahun sampai 64 tahun (Simanjuntak, 2011).

2.5.1 Teori Penyerapan Tenaga Kerja

Penyediaan lapangan kerja merupakan salah satu tujuan Pembangunan ekonomi, terutama di Indonesia, dimana pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan pertumbuhan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi yang semakin meningkat dan membaik akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja disuatu daerah. Ada dua faktor yang mempengaruhi keadaan ketenaga kerjaan yaitu faktor permintaan (dipengaruhi oleh dinamika pembangunan ekonomi) dan faktor penawaran (ditentukan oleh perusahaan struktur penduduk) (Nuraulian, 2017).

Menurut Rahardjo (2013) penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terserap pada suatu sektor dalam waktu tertentu. Penyerapan tenaga kerja pada dasarnya tergantung dari besar kecilnya permintaan tenaga kerja (Adisasmita, 2013). Penyerapan tenaga kerja secara umum menunjukkan besarnya kemampuan suatu perusahaan untuk menyerap sejumlah tenaga kerja dalam kaitannya dengan produksi. Kemampuan untuk menyerap tenaga kerja besarnya tidak sama antara sektor satu dengan sektor yang lain (Sumarsono, 2010). Menurut Todaro (2011), penyerapan tenaga kerja merupakan penerimaan tenaga kerja untuk melakukan tugas (pekerjaan) atau suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya lapangan siap diisi oleh para pencari pekerjaan (Todaro & Smith, 2011).



Semakin tinggi permintaan oleh konsumen terhadap barang dan jasa maka permintaan tenaga kerja juga akan meningkat dan juga sebaliknya. Sehingga keputusan dari pengusaha untuk mengurangi atau meningkatkan permintaan tenaga kerja sangat berpengaruh pada permintaan konsumen. Hal ini dikarenakan sebuah perusahaan mempekerjakan seseorang untuk meningkatkan nilai produksinya (Simanjuntak, 2011).

Menurut Sumarsono (2010), permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil.

1. Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relative mahal dengan input- input lain yang harganya relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimal.
2. Perubahan permintaan pasar akan hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan. Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerjanya.
3. Apabila harga barang modal turun, maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini



akan cenderung meningkatkan produksi karena permintaan hasil bertambah besar. Disamping itu permintaan akan tenaga kerja dapat bertambah karena peningkatan kegiatan Perusahaan (Simanjuntak, 2011).

2.6 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan *output* nasional yang semakin lama semakin besar. Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat adalah (1) akumulasi modal, termasuk di dalamnya semua investasi baru dalam bentuk tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia melalui perbaikan di bidang kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, (3) kemajuan teknologi yang secara luas diartikan sebagai cara baru dalam menyelesaikan pekerjaan (Todaro & Smith, 2006).

Menurut Sadono Sukirno (2013:9), pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Secara konvensional, pertumbuhan ekonomi suatu negara diukur sebagai peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB), begitu juga untuk tingkat regional (daerah) dapat diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian, tujuan PDB adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Cara menghitung PDB dibagi menjadi dua pendekatan yaitu pertama, pendekatan pendapatan yang terdiri dari gaji, sewa, laba, dan bunga. Kedua, pendekatan pengeluaran yang dihitung dengan menjumlahkan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah dan ekspor neto (Mankiw, 2007).



Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB) dalam

suatu negara tertentu selama periode waktu tertentu. Dilihat dari pendekatan pengeluaran, salah satu unsur dalam pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah.

2.6.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik

Menurut Teori Neoklasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada ketersediaan faktor-faktor produksi: penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal dan tingkat kemajuan teknologi (Arsyad, 2010). Analisis teori ini didasarkan atas asumsi-asumsi dari teori klasik yaitu bahwa perekonomian berada pada tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan tingkat penggunaan penuh (*full utilization*) dari faktor-faktor produksinya. Model ini menjelaskan bahwa teknologi yang digunakan menentukan besarnya *output* yang diproduksi dari jumlah modal dan tenaga kerja tertentu.

2.6.2 Teori Pertumbuhan Klasik

Adam Smith merupakan salah satu tokoh yang mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut Boediono (2018:7), Adam Smith merupakan orang pertama yang mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis yang terdiri dari dua aspek utama yaitu pertumbuhan *output* (GDP) total dan pertumbuhan penduduk (Boediono, 2018). Perhitungan *output* dapat digunakan pada tiga variabel yaitu sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan persediaan modal. Sedangkan pada faktor kedua yaitu pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya mengenai spesialisasi dan pembagian kerja. Menurut Smith makin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja, dan selanjutnya produktivitas per pekerja.



tumbuhan ekonomi dari David Ricardo ialah *the law of diminishing*

ukunya yang berjudul "*The Principles of political Economy and*

Taxation" (1917). Dalam pemikirannya berisi mengenai terjadinya penurunan terhadap ketersediaan produk marginal disebabkan karena terbatasnya jumlah tanah. Menurut David Ricardo, peningkatan produktivitas pada tenaga kerja lebih membutuhkan kemajuan teknologi dan akumulasi modal yang sangat cukup. Dengan begitu pertumbuhan akan tercapai secara optimal (Boediono, 2018).

2.6.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Rostow dan Musgrave

Teori Rostow and Musgrave dalam Mangkoesoebroto (2001) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi (Mangkoesoebroto, 2001).

2.6.4 Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen (*endogenous growth theory*) yang dipelopori oleh Romer (1986) dan Lucas (1988) memiliki peran dalam menjelaskan model pertumbuhan yang lebih maju, dimana perubahan teknologi bersifat endogen (berasal dari dalam ekonomi) dan memiliki pengaruh pada pertumbuhan jangka panjang. Peran modal dalam model ini tidak sekedar modal fisik (*physical capital*) mencakup pula modal manusia (*human capital*). Selain itu, teori ini



mengasumsikan tingkat pengembalian yang meningkat (*increasing return to scales*) pada fungsi produksi agregatnya dan menekankan peran eksternalitas dalam menentukan tingkat pengembalian investasi modal (Arsyad, 2010).

2.7 Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di

Wilayah Daerah Penyangga Ibu Kota Nusantara

2.7.1 Pengaruh UMP, Investasi, dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Upah merupakan imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atas perusahaan berdasarkan lamanya jam kerja dan produk yang dihasilkan (Suharto & Dharmala, 2016). Pemerintah menetapkan tingkat upah berdasarkan standar kebutuhan setiap daerah yang bertujuan untuk menjaga kestabilan perekonomian. Upah yang ditetapkan secara bertahap agar setara dengan kebutuhan minimum disebut dengan upah minimum regional (UMR) (Alexander et al., 2017). Upah yang tinggi akan menyebabkan penurunan jumlah pekerja dan mengakibatkan bertambahnya pengangguran. Upah yang tinggi mengindikasikan bahwa tingginya biaya produksi yang berdampak pada pengurangan kapasitas produksi perusahaan dan pada akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi (Said, 2017).

Aktivitas perekonomian yang diakibatkan oleh masalah tingkat upah dapat menyebabkan kejadian demi kejadian yang merugikan perusahaan dan masyarakat, seperti mogok kerja dan melakukan demonstrasi yang berlarut-larut sehingga menjadi pemicu penurunan produktivitas dan mengganggu aktivitas perekonomian secara luas.



Itu juga dapat mengganggu jalannya investasi dari pihak luar untuk pertumbuhan ekonomi yang digambarkan oleh PDRB menjadikan pihak

investor kurang percaya akibat ketidakstabilan tingkat upah yang ditetapkan oleh pihak pemerintah (Alexander et al., 2017).

Salah satu faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan perekonomian di suatu negara adalah kinerja investasi negara tersebut. Investasi memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan ekonomi, karena setiap tambahan investasi akan menyebabkan kenaikan pada jumlah *output* yang diproduksi (Sirait, 2020). Investasi yang memiliki pengaruh besar merupakan investasi swasta karena investasi yang memiliki dampak secara langsung pada peningkatan produktivitas perusahaan, seperti pembelian mesin-mesin produksi baru, perluasan area produksi, serta pembukaan industri-industri baru serta perluasan atau menambah gudang-gudang penyimpanan produksi. Dampak yang diberikan dari investasi swasta ialah peningkatan kapasitas produksi serta kapasitas *output* sehingga dapat membuat tingginya kebutuhan akan penyerapan terhadap tenaga kerja (Suharto & Dharmala, 2016).

Investasi berpengaruh besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan. Besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya permintaan tenaga kerja, semakin besar investasi maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja (Desideria et al., 2019). Aktivitas investasi akan menambah stok barang modal yang tersedia pada perekonomian sebuah negara. Penambahan ini akan berdampak pada peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas secara nasional, yang akhirnya dapat mendorong peningkatan PDB atau pertumbuhan ekonomi (Sirait, 2020).



**h Dana Transfer Pusat, Investasi Swasta, dan Penyerapan
Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sangat bergantung pada peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiaya kegiatan pembangunan baik bidang ekonomi maupun non ekonomi, yang sering disebut sebagai pengeluaran pemerintah (Zahari, 2017). Pandangan untuk melihat kaitan antara pengeluaran pemerintah dengan perkembangan perekonomian dapat dianalisa melalui hukum Wagner (*Wagner Law*), yang mengatakan bahwa setiap pertambahan pendapatan perkapita maka selaras dengan pengeluaran pemerintah yang juga meningkat (Solikin, 2018; Erdkhadifa, 2022). Pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yang perlu dilaksanakan dan dikerjakan oleh pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*) pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional (Sukirno, 2016; Zahari, 2017; Amelia & Ekobelawati, 2018).

Pemerintah daerah memperoleh bantuan transfer dana dari pemerintah pusat berupa Dana Perimbangan sebagai sumber dana untuk pelaksanaan pembangunan, selain dari sumber utama berupa Pendapatan Asli daerah (PAD) dan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Hasan, 2015; Amelia & Ekobelawati, 2018). Berdalih pada teori pertumbuhan endogen, pengeluaran pemerintah memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi implikasi pengeluaran pemerintah adalah untuk kegiatan produktif misalnya belanja infrastruktur. Belanja yang bersifat



bersentuhan langsung dengan kepentingan publik akan menjadi
ekonomi. Misalnya, pembangunan infrastruktur akan mendorong

dan adanya investasi ekonomi akan berkembang dan menciptakan

lapangan kerja baru sehingga akan menyerap pengangguran dan memperkecil kemiskinan (Hasan, 2015; Amelia & Ekobelawati, 2018). Kemiskinan dapat membuat pendapatan perkapita suatu negara menjadi rendah. Rendahnya pendapatan perkapita akan menurunkan daya konsumsi masyarakat. sehingga permintaan kuantitas produksi barang dan jasa juga ikut menurun. Dengan penurunan tingkat produksi tersebut akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi juga ikut rendah (Firmansyah, 2021).

2.7.3 Pengaruh Inflasi, Investasi Swasta, dan Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan yang selanjutnya adalah inflasi (Desideria et al., 2019). Inflasi merupakan suatu kondisi dimana meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) yang berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan ketidaklancaran distribusi (Karlina, 2017). Pihak yang paling memungkinkan dalam mengatasi inflasi ialah pemerintah (Suharto & Dharmala, 2016). Tingginya inflasi yang terjadi akan menghambat dalam pembangunan ekonomi dan aktifitas perekonomian pada masyarakat sehingga memperlambat kegiatan perekonomian dan pada akhirnya menurunkan pertumbuhan ekonomi (Mahzalena & Juliansyah, 2019).



Inflasi dapat menjadi pisau bermata dua yang akan berdampak pada tingkat ekonomi secara agregat. Diantaranya keseimbangan eksternal dan terjadinya guncangan dalam negeri akan menimbulkan fluktuasi harga yang berakhir dengan peningkatan inflasi pada perekonomian.

Inflasi dapat menimbulkan efek yang baik dalam perekonomian. Keuntungan perusahaan meningkat dan akan menggalakkan investasi (Hastin, 2022). Peningkatan investasi akan mempengaruhi penambahan stok modal yang berdampak pada meningkatnya produktivitas serta kapasitas dan kualitas produksi sehingga serta mampu mendorong ekspansi usaha atau industri sehingga berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja (Paramita & Christianingrum, 2017). Kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat secara terus menerus tidak hanya meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, melainkan juga dapat meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat (Hastin, 2022).

